

**IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN NELAYAN
DI DESA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

ASEP NURDIN ROSIHAN ANWAR
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai implementasi pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Teori dan konsep-konsep yang digunakan adalah Teori Implementasi Kebijakan dan pemberdayaan nelayan. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi lapangan di Kabupaten Pangandaran. Desain penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi program pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Hasil yang diperoleh adalah bahwa program pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sudah berjalan dengan baik, namun masih terlaksana dengan maksimal, karena ada beberapa faktor yang menjadi penghambat seperti komunikasi yang tidak terjalin secara maksimal dilapangan, sumber daya manusia yaitu nelayan masih menggunakan cara cara tradisional dalam melaut kemampuan dan keterampilan nelayan menggunakan peralatan modern masih terbatas, kesungguhan implementator dalam melaksanakan program belum secara detil, dan struktur birokrasi dalam mengeluarkan kebijakan program harus memiliki unsur keberlanjutan agar mereka dapat menjadi lebih mandiri dan tidak memiliki ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah.

Kata Kunci: *Implementasi, Pemberdayaan Nelayan, Nelayan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, Pangandaran.*

A. PENDAHULUAN

Selama bertahun-tahun kawasan pesisir dengan aktivitas kelautan baik itu nelayan maupun pembudidayaan ikan di laut sangatlah identik dengan kemiskinan. Pembangunan perikanan dan kelautan dimasa yang akan datang harus dilaksanakan secara lebih bijaksana, efektif dan efisien, sehingga pembangunan di sub sektor perikanan

dan kelautan tidak hanya semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memberikan kesejahteraan bagi para pelaku pembangunan perikanan secara adil, serta tetap terpeliharanya daya dukung dan kualitas lingkungan secara seimbang sehingga pembangunan perikanan dan kelautan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Suarjono, (2008) menyatakan bahwa nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan dan binatang air lainnya atau tanaman air. Tingkat kesejahteraan nelayan ditentukan oleh hasil tangkapannya. Banyaknya tangkapan dapat mencerminkan besarnya pendapatan yang diterima dan pendapatan tersebut sebagian besar untuk keperluan konsumsi keluarga atau keperluan fisik minimum. Kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir di berbagai daerah di Indonesia umumnya ditandai oleh adanya beberapa karakteristik, seperti kemiskinan, sosial dan keterbelakangan budaya, rendahnya kualitas sumber daya manusia karena kebanyakan masyarakat pesisir berjenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau tidak tamat SD, kurangnya fungsi dari kehadiran Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), atau kapasitas organisasi masyarakat sipil. Kemiskinan, struktur sosial yang tidak setara, degradasi lingkungan dan kurangnya infrastruktur dasar adalah beberapa masalah yang dihadapi oleh nelayan.

Menurut Hassanudin, dkk (2013), kondisi dan masalah umum yang dialami oleh nelayan adalah sebagai berikut: terisolasi desa pesisir, fasilitas pelayanan dasar termasuk infrastruktur fisik masih terbatas, kurang terpelihara kondisi lingkungan, yang tidak memenuhi persyaratan standar kesehatan, masyarakat

berpenghasilan rendah, karena teknologi tidak mendukung perikanan skala besar, kepemilikan peralatan memancing yang terbatas, masalah ekuitas karena kelangkaan lembaga keuangan, pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki tergolong rendah, dapat disimpulkan bahwa masalah utama yang biasa dialami oleh masyarakat pesisir adalah kemiskinan.

Masyarakat nelayan identik dengan kemiskinan yang disebabkan dari faktor ekonomi, yaitu kurangnya modal yang dimiliki para nelayan, teknologi yang dimiliki, rendahnya akses pasar dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengolahan sumber daya alam dan non ekonomi atau biasa disebut faktor sosial seperti pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, rendahnya tingkat pendidikan, dan rendahnya tingkat kesehatan serta alasan lain seperti sarana dan prasarana umum di wilayah pesisir (Prakoso, 2013).

Menurut Rahmatika dkk (2013:2), rendahnya pendapatan nelayan yang berdampak pada kemiskinan disebabkan karena tidak stabilnya hasil tangkapan ikan yang diperoleh nelayan, faktor tersebut didukung oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai, iklim, serta adanya oknum tengkulak yang membeli hasil tangkapan nelayan dengan anggaran dana yang relatif murah. Hasrat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam arti sebenarnya adalah tujuan mulia yang hendak dicapai. Peningkatan

kesejahteraan penduduk dapat dimungkinkan apabila pendapatan penduduk mengalami kenaikan yang cukup hingga mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupannya. Hal ini dapat diartikan bahwa kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan sebagainya tersedia dan mudah dijangkau setiap penduduk sehingga pada gilirannya penduduk yang miskin semakin sedikit jumlahnya.

Menurut Sugiharto (2007:68), pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan salah satu kecenderungan baru dalam paradigma pembangunan setelah sekian lama wilayah laut dan pesisir menjadi wilayah yang dilupakan dalam pembangunan di Indonesia. Selama ini pembangunan di Indonesia sangat berorientasi pada wilayah daratan dan lebih khusus sangat berorientasi pada industri berat. Setelah sekian lama berjalan disadari bahwa paradigma pembangunan yang demikian tidak memiliki *trickle down effect* seperti yang diharapkan sehingga menyebabkan kualitas masyarakat nelayan lebih rendah, tercermin dari masih banyaknya kantong-kantong kemiskinan yang masih dijumpai pada masyarakat nelayan yang masih sulit untuk diatasi, karena peralatan yang digunakan masih tergolong tradisional yang menyebabkan nelayan tidak mampu meningkatkan hasil produksi sehingga akan berdampak pada rendahnya tingkat pendapatan masyarakat pesisir di Kecamatan

Pangandaran. Pendapatan yang rendah akan berpengaruh pada kelangsungan hidup nelayan yang kurang memadai dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan akan gizi, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan akan gizi yang kurang berdampak pada kesehatan nelayan sehingga nelayan tidak akan produktif dalam bekerja.

Dalam hal ini pemerintah sangat berperan penting dalam memfasilitasi masyarakat pesisir guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat. Upaya Pemerintah Daerah dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan sudah terealisasi dengan adanya Program Pemberdayaan Usaha Mina Perdesaan (PUMP), Pembangunan Koperasi Nelayan, Kedai Pesisir atau Klinik Bisnis, Pembangunan *solar, packed, dealer*, untuk nelayan (SPDN), Pembangunan Pasar Ikan Segar (*Cold Storage*), Pembangunan Dermaga Perikanan, Pembangunan Balai Kelompok Nelayan, Pembangunan Pabrik Es, Pembangunan Break Water, dan program yang mengacu pada pengembangan kapasitas nelayan seperti Pembangunan *Learning Center*, Bimbingan Teknis, Regenerasi Nelayan, serta Peningkatan Nilai Tukar dimana semua program-program ini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat pesisir sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir diharapkan dapat meningkat.

Berdasarkan pengamatan sementara peneliti di lapangan pada masyarakat nelayan di Kabupaten Pangandaran ditemukannya beberapa gejala, seperti: Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan pada umumnya masih menggunakan peralatan yang sangat sederhana dan kurang memadai dalam melakukan aktivitasnya akibat terbatasnya modal maupun teknologi yang dimiliki, seperti perahu fiber dan kapal motor dan peralatan penangkapan ikan seperti pancing, rawai, bubu, jaring, dan lain sebagainya, masih kurang memadai baik dari jumlahnya maupun kondisi peralatannya.

Bantuan yang diberikan pemerintah melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat yang diterapkannya berupa sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan tangkap seperti perahu, kapal motor dan peralatan penangkapan ikan antara lain jaring, pancing, bubu dan rawai, masih mencapai sebagian kecil nelayan yang ada. Terbatasnya sumber daya manusia yang ahli dan terampil di bidang perikanan yang sangat dibutuhkan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang pengelolaan usaha perikanan, dimana tenaga penyuluh dan pelatihan tentang pengelolaan usaha perikanan. Akibat dari keterbatasan modal dan fasilitas yang dimiliki serta sumber daya manusia yang ahli dan terampil dibidang perikanan, maka hasil tangkapan ikan yang diperoleh para nelayan belum mencapai hasil yang

maksimal sehingga tidak dapat memberikan keuntungan yang memadai ditambah lagi kadang-kadang karena cuaca buruk yang menghambat aktivitas penangkapan ikan di laut, serta rendahnya harga ikan hasil tangkapan di pasaran.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan pemerintah adalah suatu upaya yang bertujuan untuk mewujudkan suatu ekonomi partisipatif yang mampu memberikan akses yang fair dan adil bagi sebuah lapisan masyarakat dalam proses produksi, distribusi dan memanfaatkan potensi daerah tanpa ada hambatan. Oleh sebab itu, sangat diperlukan peran pemerintah daerah untuk mengatasi hal ini melalui kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi, sehingga masyarakat nelayan yang ada di daerah tersebut khususnya maupun masyarakat pada umumnya dapat meningkatkan perekonomiannya di masa mendatang.

Dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk lebih mendalam menganalisis fenomena diatas terutama dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Implementasi

Implementasi secara teori selama ini diartikan sebagai pelaksanaan dan biasanya yang dilaksanakan tersebut adalah sebuah

kebijakan atau suatu program yang telah disiapkan atau dirancang untuk dilaksanakan, sehingga implementasi memiliki perintah yang harus dilaksanakan dengan sungguh sungguh dan dijalankan sepenuhnya apa yang telah dirancang dan direncanakan. Permasalahan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan ketika dilapangan terjadi perbedaan dalam pelaksanaan dengan rancangan maka program tersebut akan sia sia dan tidak sesuai.

Menurut Agustino (2014:138) mengemukakan pengertian implemtasi adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Dengan demikian implementasi merupakan sebuah program dan kebijakan umum dalam pelaksanaannya harus sesuai antara konsep yang dituangkan di dalam kertas dengan pelaksanaannya jangan hanya untuk memuaskan pemimpin tetapi dalam pelaksanaannya tidak bisa diterima oleh klien karena konsep yang bagus didalam kertas tersebut sulit dilaksanakan di lapangan.

2. Pemberdayaan Nelayan

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris "*empowerment*" yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "pemberkuasaan", dalam arti pemberian atau peningkatan "kekuasaan" (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (*disadvantaged*).

Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata "berdaya" yang berarti memiliki atau mempunyai daya. Daya berarti kekuatan, berdaya berarti memiliki kekuatan. Namun pada perkembangannya dari berbagai referensi dan bidang menunjukkan keragaman pengertian atas makna *empowerment* tersebut. *Empowerment* pada umumnya diterjemahkan kedalam istilah "pemberdayaan". Sehingga pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.

3. Nelayan

Kusnadi, (2006:27) berpendapat "Masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat yang pekerjaannya melaut untuk menangkap ikan." Dengan demikian nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya.

C. METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan di Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Sugiono (2012:9) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan

untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Selanjutnya, Sukmadinata (2011:73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Dengan demikian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan unggulan perekonomian masyarakat yang berada di wilayah Desa Pangandaran masih didominasi oleh perikanan atau kelautan dan pariwisata. Saat ini Desa Pangandaran merupakan penghasil devisa tertinggi di sektor Pariwisata di Kabupaten Pangandaran dan unggulan Jawa barat. Potensi perikanan laut di Desa Pangandaran cukup besar sebagai penopang retribusi atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangandaran.

Pemberdayaan nelayan yang dilaksanakan di Desa Pangandaran pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang dianggap tingkat kesejahteraan nelayan masih rendah, banyak program yang digulirkan oleh pemerintah

kepada Nelayan Pangandaran, baik program dari kementerian kelautan dan perikanan maupun program dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten.

Pemberdayaan nelayan ada 2 (dua) jenis, yaitu bantuan peningkatan produktifitas penangkapan ikan, dimulai dari bantuan motorisasi, bantuan alat penangkapan, bantuan kapal besar dan bantuan lainnya sementara jenis bantuan yang kedua dengan melakukan peningkatan kemampuan dan keterampilan nelayan untuk memanfaatkan potensi pariwisata di Desa Pangandaran supaya tidak terlalu tergantung dengan melaut sehingga pada saat musim paceklik nelayan memiliki kemampuan dan keterampilan lain. upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Desa Pangandaran.

Banyaknya bantuan kepada nelayan melalui program pemberdayaan nelayan menyebabkan ketergantungan sehingga nelayan di Pangandaran terkesan menjadi malas dan termanjakan dengan bantuan yang menyebabkan tingkat kesejahteraan nelayan tidak mengalami peningkatan, untuk mengantisipasi ketergantungan tersebut dalam melaksanakan program pemberdayaan nelayan Pangandaran selalu diajak diskusi dan dilibatkan dalam penentuan program pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan nelayan. Selain Program pemberdayaan nelayan pemerintah juga memberikan jaminan asuransi jiwa

husus untuk nelayan sehingga nelayan di Pangandaran tidak merasa was was dan harus merasa bangga dengan profesi nelayan.

Program pemberdayaan nelayan merupakan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, sehingga ketika program pemberdayaan nelayan berjalan maka tingkat kesejahteraan nelayan di Desa Pangandaran akan meningkat.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan Program Pemberdayaan Nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran maka dapat dilihat dari penilaian Implementasi Program nelayan tentang bagaimana tingkat keberhasilan program pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dilihat dari implementasi pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang diuraikan, sebagai berikut:

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga kenelayanan sebagai pemberi kebijakan program pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dilakukan secara maksimal, komunikasi dilakukan hanya pada saat acara resmi seperti sosialisasi, dan diskusi, sementara nelayan tidak berani

menyampaikan pertanyaan pada saat acara resmi, nelayan lebih berani berkomunikasi langsung diluar acara resmi.

2. Faktor Sumber Daya

Implementasi pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dilihat dari faktor sumber daya manusia, yaitu nelayan belum memiliki keahlian dan keterampilan yang mumpuni dan harus ditingkatkan terlebih dahulu supaya kebijakan pemberdayaan nelayan bisa dilaksanakan maksimal, walaupun tingkat kesadaran dan partisipasi nelayan terhadap program pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran bisa dikatakan sudah cukup baik, keterlibatan lembaga lembaga dan *stakeholder* dilapangan sangat aktif dan terlihat antusias.

3. Faktor Disposisi

Implementasi pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dilihat dari faktor disposisi dengan model keberlanjutan belum dilakukan secara maksimal, pemanfaatan potensi untuk keberlanjutan suatu kebijakan yang terjadi menyebabkan ketegangan dan seakan akan memanjakan nelayan.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Implementasi pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dilihat dari faktor struktur birokrasi keterpaduan kebijakan dan

strategi di tingkat lokal perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan lebih dalam lagi dan dalam melakukan pendataan yang menyeluruh dan meratan harus sungguh sungguh dilakukan dimulai dari tingkat Rukun Nelayan hingga tingkat dinas supaya bantuan yang digulirkan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi kebijakan Pemberdayaan Nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, maka penulis menyampaikan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Implementasi Pemberdayaan Nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dilihat dari faktor komunikasi belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal, hal itu terlihat belum adanya padunya tujuan yang ingin dicapai dengan program-program yang tidak sinkron, sehingga kegiatan yang dirumuskan sebelumnya tidak dicapai, seperti kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan lain-lain, yang mengakibatkan informasi tentang pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pemberdayaan nelayan, pengolahan hasil laut, dan pemanfaatan potensi pariwisata masih rendah, dan nelayan menjadi termanjakan dengan banyaknya

bantuan yang diterima oleh nelayan, walaupun tingkat kesejahteraan nelayan mengalami peningkatan.

2. Implementasi pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dilihat dari faktor sumber daya, kemampuan dan keterampilan teknologi baru masih terbatas nelayan Pangandaran masih menggunakan cara cara tradisional untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada, dilihat dari partisipasi nelayan dalam mengikuti program pemberdayaan nelayan sangat tinggi akan tetapi pandangan dan pemahaman tentang tujuan pemberdayaan masih kurang, dan partisipasi kelembagaan terkait sangat besar akan tetapi sudah merasa puas dengan partisipasi nelayan yang tinggi tanpa adanya evaluasi pemahaman nelayan tentang tujuan program.

3. Implementasi pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dilihat dari faktor disposisi, harus ada kesungguhan dari implementor dalam melaksanakan kebijakan supaya kebijakan yang digulirkan bisa berkelanjutan dan bermanfaat sesuai dengan tujuan utama dari kebijakan yang digulirkan, karena keberlanjutan program pemberdayaan akan terputus ketika

tidak ada kesungguhan dari implementor dan akhirnya nelayan menjadi manja dan ketergantungan dengan bantuan, maka harus disiapkan pola dan strategi khusus untuk memberikan pemahaman supaya kebijakan program pemberdayaan berjalan dan berkelanjutan, dilihat dari kerjasama antar *stakeholders* sudah terjalin tinggal pengumpulan data yang lebih terkoneksi dan update, meninggalkan unsur kedekatan dalam memberikan bantuan sehingga tidak adalagi nelayan yang tidak mendapatkan bantuan karena tidak memiliki kedekatan dengan pengurus atau pengelola program, adanya kerjasama yang baik dari semua pihak menjadi kunci utama dalam keberlanjutan program pemberdayaan nelayan.

4. Implementasi pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dilihat dari faktor struktur birokrasi Ditinjau dari prinsip keterpaduan berupa kebijakan dan strategi dalam pemberdayaan nelayan, masih ada beberapa kegiatan yang terlihat ketidakselarasan di tingkat lokal dan sering kali terjadi lempar tanggung jawab atas kegiatan yang di lakukan di lapangan. Sementara dari prinsip keuntungan sosial ekonomi, tidak adanya wadah atau suatu lembaga usaha yang mampu menampung olahan hasil laut dan

belum mampu memanfaatkan potensi lain seperti potensi pariwisata untuk mendapatkan penghasilan tambahan selain melaut.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta, Rineka Cipta.
- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2009. *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*. Jakarta : Dep PU.
- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2009. *Pemberdayaan dan Kerelawanan*. Jakarta : Dep PU.
- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2009. *Pembangunan Partisipatif*. Jakarta : Dep PU.
- Edi Suharto. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung. Refika Aditama.
- Ginandjar Kartasasmita. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta. Pustaka Dicisendo.

- Kusnadi. (2006). *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung. Humaniora.
- Kusnadi. (2000). *Nelayan Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung. Humaniora.
- M Jafar Hafsa. (2008). *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung. Institut For Religious and Institutional Studies (iris) Press.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Ketiga. Bandung. Alfabeta.
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul anastesinya?*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Loekman Soetrisno. 2005. *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*. Yogyakarta : Kanisius Silalahi,
- Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Di Wilayah Laut.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.